

## ABSTRAK

Ahmad Hadi Nur Rofiq, 126102201075, Disparitas Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Perspektif *Maslahah Najmuddin Al-Thufi* (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk), Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Putusan Hakim, Maslahah Najmuddin Al-Thufi*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam kasus hak asuh anak di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk, dengan mengadopsi maslahah perspektif Najmuddin al-Thufi. Perspektif maslahah al-Thufi menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan maslahat (kebaikan) bagi pihak yang terlibat, terutama anak, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari kerugian. Dalam praktiknya, putusan hakim mengenai hak asuh anak seringkali berbeda-beda meskipun melibatkan prinsip yang sama, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosial, budaya, dan pemahaman hakim terhadap maslahat yang berlaku. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip maslahah al-Thufi digunakan untuk menganalisis putusan hakim di kedua pengadilan tersebut, serta bagaimana penerapannya dapat mengurangi disparitas dan mencapai keputusan yang lebih konsisten dan adil dalam hal hak asuh anak, yang pada akhirnya memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama keputusan hakim.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana disparitas putusan Hakim dalam perkara Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk? (2) Bagaimana disparitas putusan hakim dalam hak asuh anak perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi? Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui dan memetakan disparitas putusan hakim tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk.

(2) untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan perspektif *Maslahah* Najmuddin Al-Thufi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sumber data primer dengan fakta lapangan dilokasi penelitian, sumber data sekunder dengan artikel, jurnal risalah fii-ri'ayah al-maslahah. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan kondensasi data, verifikasi, dan penyimpulan. Kemudian peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan tiangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbedaan putusan dilihat dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu menurut pasal 14 UU No. 23 tahun 2002 anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kecuali ada hal yang menentukan yang lain. Kemudian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan *hadhanah* adalah ibu kandungnya. Namun berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dimana hak asuh anak jatuh kepada bapak hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Kifayatul Ahyar* hal 94. Kemudian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak dan berkelakuan buruk serta merugikan kesejahteraan dan masa depan anak. (2) Pertimbangan Hakim tentang hak asuh anak ditinjau perspektif maslahah menurut Najmuddin al-Thufi, dapat dijelaskan sebagai berikut; kemaslahatan dalam putusan hak asuh anak, kemaslahatan (kebaikan) bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam putusan hak asuh anak, baik yang diberikan kepada ibu maupun ayah. Dalam kedua putusan tersebut, hakim mempertimbangkan dampak positif yang akan diterima anak dari keputusan yang diambil. Jika pengasuhan oleh ibu atau ayah dianggap memberikan kemaslahatan bagi anak, maka keputusan tersebut lebih diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa maslahah

bagi anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pengadilan, sesuai dengan konsepsi maslahah al-Thufi; Amanah dalam pengasuhan anak, mengutamakan kebaikan dan menghindari keburukan dan perlindungan terhadap maslahah sebagai prinsip hukum tertinggi.

## **ABSTRACT**

*Ahmad Hadi Nur Rofiq, 126102201075, Disparity of Judges' Decisions on Child Custody in the Perspective of Maslahah Najmuddin Al-Thufi (Study in Tulungagung Religious Court and Nganjuk Religious Court), Islamic Family Law Study Program, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.*

**Keywords:** *Child Custody, Judge's Decision, Maslahah Najmuddin Al-Thufi*

*This study aims to analyze the disparity of judges' decisions in child custody cases in the Tulungagung Religious Court and the Nganjuk Religious Court, by adopting the maslahah perspective of Najmuddin al-Thufi. Al-Thufi's maslahah perspective emphasizes that every legal decision must be based on maslahat (good) considerations for the parties involved, especially children, with the aim of achieving welfare and avoiding harm. In practice, judges' decisions regarding child custody often vary despite involving the same principles, this is influenced by factors such as social conditions, culture, and judges' understanding of the applicable maslahat. This research will explore how al-Thufi's maslahah principle is used to analyze judges' decisions in the two courts, as well as how its application can reduce disparities and achieve more consistent and fair decisions in terms of child custody, ultimately considering the best interests of the child as the main basis for judges' decisions.*

*The formulation of the problems in this thesis are (1) How is the disparity of judges' decisions in cases of custody of children who are not yet mumayyiz in the Tulungagung Religious Court and the Nganjuk Religious Court? (2) How is the disparity of judges' decisions in child custody from the perspective of Maslahah Najmuddin Al-Thufi? The research objectives are (1) to find out and map the disparity of judges' decisions on custody of children who are not yet mumayyiz in the Tulungagung Religious Court and the Nganjuk Religious Court. (2) to know and analyze the disparity of decisions from the perspective of Maslahah Najmuddin Al-Thufi*

*This research uses a qualitative descriptive approach method and field research type. Primary data sources with field facts at the research location, secondary data sources with articles, journals risalah fii-ri'ayah al-maslahah. Data collection using in-depth interviews, and documentation. While data analysis uses data condensation, verification, and conclusion. Then the researcher checks the validity of the data by tiangulasi technique.*

*The results showed that (1) The difference in decisions seen from the consideration of the Judge of the Nganjuk Religious Court decided that custody of children who were not yet mumayyiz was given to the mother according to Article 14 of Law No. 23 of 2002, children have the right to be cared for by their own parents. Unless there are things that determine otherwise. Then based on Article 105 letter (a) jo Article 156 letter (a) of the Compilation of Islamic Law, the one entitled to the care and maintenance of hadhanah is the biological mother. However, it is different from the Tulungagung Religious Court Decision where child custody falls to the father, this is in accordance with the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 110K / AG / 2007 dated December 7, 2007, and the opinion of Islamic Law experts in the book Kifayatul Ahyar p. 94. Then based on article 49 of Law Number 1 of 1974 that parents can be deprived of their power over children and behave badly and harm the welfare and future of the child. (2) Judges' consideration of child custody in terms of maslahah perspective according to Najmuddin al-Thufi, can be explained as follows; the benefit in child custody decisions, the benefit (goodness) for children is the main consideration in child custody decisions, both given to mothers and fathers. In both decisions, judges consider the positive impact that children will receive from the decisions taken. If care by the mother or father is considered to provide benefits for the child, then the decision is preferred. This shows that maslahah for children is the top priority in every court decision, in accordance with al-Thufi's conception of maslahah; Amanah in childcare, prioritizing good and avoiding bad and protection of maslahah as the highest legal principle.*